

KASA BULELENG		
Tanggal	9-6-2020	Nomor
Waktu	09.00 wtk	22
Paraf	Xr.	



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN

AGENDA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	
NOMOR	
TANGGAL	09 JUNI 2020

Jakarta, 5 Juni 2020

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur.  
2. Sdr/i. Bupati/Walikota.  
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 892.1/3377/SJ

TENTANG  
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. SPCP IPDN Tahun 2020 dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pendaftaran peserta calon Praja IPDN Tahun 2020 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan mulai tanggal 8 s.d. 23 Juni 2020; dan
  - b. pendaftaran dilakukan secara *online/daring* melalui laman <https://dikdin.bkn.go.id/>
2. Persyaratan dan jadwal SPCP IPDN sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, serta informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan SPCP IPDN dapat dilihat pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id/2020/>
3. Menyebartuaskan informasi, sosialisasi, dan memfasilitasi dalam rangka kelancaran pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2020.
4. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2020 tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada laman <https://dikdin.bkn.go.id/> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN.

5. Biaya SPCP IPDN Tahun 2020 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020.
6. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2020 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 892.1/3377/SJ  
TENTANG  
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2020

I. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN CALON PRAJA IPDN  
TAHUN 2020

A. Persyaratan pendaftaran

1. Persyaratan umum:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2020; dan
- c. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

2. Persyaratan administrasi:

- a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C dengan ketentuan:
  - 1) nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 s.d. 2020; dan
  - 2) nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol) untuk nilai rata-rata dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 s.d. 2020.
- b. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el.
- c. Bagi yang belum memiliki KTP-el atau KK dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- d. Surat Keterangan Lulus dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang, bagi siswa SMU/MA Tahun Ajaran 2019/2020.
- e. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).
- f. Alamat e-mail yang aktif.
- g. Pasfoto.



2. Selanjutnya pelamar melakukan *log in* dengan menggunakan *user ID* (NIK) dan *password* yang telah diperoleh dari laman <https://dikdin.bkn.go.id/> untuk:
  - a) Mengisi biodata calon peserta seleksi.
  - b) Mengunggah *scanning* dokumen sebagai berikut:
    - 1) KTP-el asli atau fotokopi bagi peserta yang berusia 17 Tahun atau KK bagi yang belum memiliki KTP-el, atau melampirkan Surat Keterangan Kependudukan atau resi Permintaan Pembuatan KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan format jpg ukuran maksimal 200 kb;
    - 2) ijazah asli atau fotokopi legalisir (diunggah halaman depan dan belakang) dengan format pdf ukuran maksimal 1.000 kb;
    - 3) surat Keterangan Lulus asli berstempel dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang, bagi siswa SMU/MA Tahun Ajaran 2019/2020 dengan format pdf ukuran maksimal 1.000 kb;
    - 4) surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan diketahui oleh Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan format pdf ukuran maksimal 1.000 kb; dan
    - 5) pasfoto berwarna (tidak hitam putih) ukuran 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja berwarna putih format jpg ukuran maksimal 200 kb.
  - c) Dalam dokumen KTP-el atau KK dan Ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir.
  - d) Mencetak bukti registrasi.
3. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan GUGUR.
4. Pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2020 dapat disampaikan melalui:

3. Persyaratan khusus:
  - a. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan.
  - b. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat.
  - c. Tidak bertato atau bekas tato.
  - d. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak.
  - e. Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan.
  - f. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat.
  - g. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
    - 1) sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
    - 2) bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
    - 3) bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;
    - 4) Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN; dan
    - 5) Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan/atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual (LGBT).
  - h. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan pendaftaran di atas. maka pendaftar dinyatakan GUGUR.
  - i. Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id/2020/>

B. Mekanisme pendaftaran

1. Pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2020 dilakukan bersamaan dengan pendaftaran Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Perguruan Tinggi Kedinasan secara *online*/daring dan terpusat melalui laman <https://dikdin.bkn.go.id/> sebagaimana alur mekanisme pendaftaran di bawah ini:

- a) email [spcpipdn@ipdn.ac.id](mailto:spcpipdn@ipdn.ac.id) selama pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2020; dan
- b) *call Centre* SPCP IPDN Nomor 0-804-1-700-700 pada jam kerja selama masa pendaftaran SPCP IPDN dari tanggal 8 s/d 23 Juni 2020.

II. KUOTA CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020

A. Kuota masing-masing Provinsi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020:

NO	PROVINSI	KUOTA
1	Aceh	51
2	Sumatera Utara	71
3	Sumatera Barat	43
4	R i a u	29
5	Kepulauan Riau	19
6	J a m b i	27
7	Sumatera Selatan	39
8	Kepulauan Bangka Belitung	19
9	Bengkulu	25
10	Lampung	35
11	DKI Jakarta	17
12	Jawa Barat	60
13	Banten	21
14	Jawa Tengah	75
15	D.I. Yogyakarta	15
16	Jawa Timur	82
17	Kalimantan Barat	33
18	Kalimantan Tengah	33
19	Kalimantan Timur	25
20	Kalimantan Selatan	31
21	Bali	23

NO	PROVINSI	KUOTA
22	Nusa Tenggara Barat	25
23	Nusa Tenggara Timur	49
24	Sulawesi Selatan	53
25	Sulawesi Tengah	31
26	Sulawesi Utara	35
27	Gorontalo	17
28	Sulawesi Tenggara	39
29	Maluku	27
30	Maluku Utara	25
31	Papua	63
32	Papua Barat	31
33	Sulawesi Barat	17
34	Kalimantan Utara	15
Jumlah		1.200

B. Kuota Provinsi Papua Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020:

NO	KABUPATEN/KOTA PROV. PAPUA	KUOTA	
		OAP	NonOAP
1.	Provinsi Papua	-	13
2.	Kota Jayapura	2	-
3.	Kabupaten Asmat	2	-
4.	Kabupaten Biak Numfor	2	-
5.	Kabupaten Boven Digoel	1	-
6.	Kabupaten Deiyai	1	-
7.	Kabupaten Dogiyai	2	-
8.	Kabupaten Intan Jaya	2	-
9.	Kabupaten Jayapura	2	-
10.	Kabupaten Jayawijaya	2	-

NO	KABUPATEN/KOTA PROV. PAPUA	KUOTA	
		OAP	NonOAP
11.	Kabupaten Keerom	1	-
12.	Kabupaten Kep. Yapen	2	-
13.	Kabupaten Lanny Jaya	2	-
14.	Kabupaten Membramo Raya	1	-
15.	Kabupaten Membramo Tengah	1	-
16.	Kabupaten Mappi	2	-
17.	Kabupaten Merauke	2	-
18.	Kabupaten Mimika	2	-
19.	Kabupaten Nabire	2	-
20.	Kabupaten Nduga	2	-
21.	Kabupaten Paniai	2	-
22.	Kabupaten Pegunungan Bintang	2	-
23.	Kabupaten Puncak	2	-
24.	Kabupaten Puncak Jaya	2	-
25.	Kabupaten Sarmi	1	-
26.	Kabupaten Supiori	1	-
27.	Kabupaten Tolikara	2	-
28.	Kabupaten Waropen	1	-
29.	Kabupaten Yahukimo	2	-
30.	Kabupaten Yalimo	2	-
Subtotal		50	13
Total		63	

C. Kuota Provinsi Papua Barat Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020:

NO	KABUPATEN/KOTA PROV. PAPUA BARAT	KUOTA	
		OAP	nonOAP
1.	Provinsi Papua Barat	-	6
2.	Kota Sorong	2	-
3.	Kabupaten Fakfak	2	-
4.	Kabupaten Kaimana	2	-
5.	Kabupaten Manokwari	2	-
6.	Kabupaten Manokwari Selatan	2	-
7.	Kabupaten Maybrat	2	-
8.	Kabupaten Pegunungan Arfak	2	-
9.	Kabupaten Raja Ampat	2	-
10.	Kabupaten Sorong	2	-
11.	Kabupaten Sorong Selatan	2	-
12.	Kabupaten Tambrau	1	-
13.	Kabupaten Teluk Bintuni	2	-
14.	Kabupaten Teluk Wondama	2	-
Subtotal		25	6
Total		31	

III. JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pelamar mendaftar secara <i>online/daring</i> dengan mengakses laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id/">https://dikdin.bkn.go.id/</a>	8 – 23 Juni 2020
2.	Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan Tahun 2020 melalui laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id/">https://dikdin.bkn.go.id/</a>	
3.	Pelamar <i>log in</i> ke laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id/">https://dikdin.bkn.go.id/</a> dengan menggunakan NIK dan <i>Password</i> yang telah didaftarkan .	

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
4.	Pelamar memilih Sekolah Kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN.	
5.	Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek <i>resume</i> dan mencetak bukti pendaftaran.	
6.	Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah melalui laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id/">https://dikdin.bkn.go.id/</a>	8 – 25 Juni 2020
7.	Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melalui laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id/">https://dikdin.bkn.go.id/</a> dan laman <a href="https://spcp.ipdn.ac.id/2020/">https://spcp.ipdn.ac.id/2020/</a>	26 Juni 2020
8.	Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai kode <i>billing</i> .	Juli 2020
9.	Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing pada laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id/">https://dikdin.bkn.go.id/</a>	Juli 2020
10.	Pengumuman Peserta SKD melalui laman <a href="https://dikdin.bkn.go.id/">https://dikdin.bkn.go.id/</a> dan laman <a href="https://spcp.ipdn.ac.id/2020/">https://spcp.ipdn.ac.id/2020/</a>	Juli 2020
11.	Pelaksanaan SKD.	Juli – Agustus 2020
12.	Pengumuman Hasil SKD melalui laman <a href="https://spcp.ipdn.ac.id/2020/">https://spcp.ipdn.ac.id/2020/</a>	Agustus 2020
13.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I.	Agustus – September 2020
14.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap I melalui laman <a href="https://spcp.ipdn.ac.id/2020/">https://spcp.ipdn.ac.id/2020/</a>	Agustus – September 2020
15.	Pantukhir a. Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran b. Tes Kesehatan Tahap II	Agustus – September 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
16.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap II melalui laman <a href="https://spcp.ipdn.ac.id/2020/">https://spcp.ipdn.ac.id/2020/</a>	Agustus – September 2020
17.	Registrasi Calon Praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor	Agustus – September 2020

Catatan: Pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes dan perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://spcp.ipdn.ac.id/2020/>

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001